



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2024

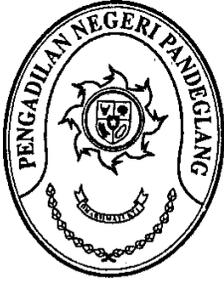


Pengadilan Negeri Pandeglang Kelas II

Jl. Raya Serang KM.I Curugsawer Pandeglang-Banten

 Pengadilan Negeri Pandeglang  info@pnpandeglang.go.id  pn-pandeglang.go.id

 Pengadilan Negeri Pandeglang  [pnpandeglang](https://www.instagram.com/pnpandeglang)  0852 1620 4443



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANTEN
PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG**

Jalan Raya Serang KM.1 Curugsawer Kabupaten Pandeglang, Banten 42213
Telepon (021) 201125 Faksimile (021) 201125
www.pn-pandeglang.go.id, info@pn-pandeglang.go.id

Pandeglang, 09 Januari 2025

Nomor : 93 /KPN.W29.U2/OT1.6/I/2025
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Pengiriman Dokumen Laporan
Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024

Kepada Yth.

KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN

di-

Jl. Raya Pandeglang KM. 6,6, Tembung
Kota Serang

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari Bapak Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 4506/SEK/OT1.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024. Bersama ini kami kirimkan *hardcopy* Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 Pengadilan Negeri Pandeglang, sedangkan dalam bentuk *softcopy* sudah kami kirimkan melalui link https://bit.ly/LAP_KEG_2024 (*screenshot pengiriman terlampir*).

Demikian dokumen laporan ini kami sampaikan, atas perhatian bapak ketua kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

AGENG PRIAMBODO PAMUNGKAS

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Arsip

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan KaruniaNya, dengan berakhirnya tahun 2024 maka berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan Pengadilan Negeri Pandeglang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan pada tahun 2024. Alhamdulillah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Pengadilan Negeri Pandeglang telah dapat menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dari Pengadilan Negeri Pandeglang.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini disusun dalam rangka memberikan gambaran tentang aktivitas Pengadilan Negeri Pandeglang dalam melaksanakan tugas – tugasnya, baik yang menyangkut tugas yustisial maupun non yustisial termasuk didalamnya masalah-masalah yang dihadapi.

Selain itu gambaran lebih lanjut mengenai Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan pertanggungjawaban kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banten, tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pandeglang pada tahun 2024 serta sebagai pelaporan pokok-pokok program kerja untuk tahun 2024.

Dalam menyusun laporan ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya, namun kami memahami betul laporan ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat kekurangannya, oleh karenanya kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan dan kesempurnaan laporan dimasa yang akan datang.

Demikian laporan ini kami buat, semoga bermanfaat dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan laporan ini, kami menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah kami berserah diri, semoga kita tetap berada dalam lindungan dan tuntunanNya, Aamiin ya Robbal Alamin.

Pandeglang, 09 Januari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang


Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H.
Nip. 19800312 200312 1 001

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II A. Keadaan Perkara di Pengadilan.....	3
- Keadaan Perkara Tingkat Pertama.....	3
B. Penyelesaian Perkara.....	4
- Jumlah sisa perkara yang diputus.....	4
- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu.....	5
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya.....	6
hukum Banding, Kasasi dan PK.....	6
- Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi.....	6
- Jumlah perkara anak yang berhasil melalui.....	7
Diversi.....	7
- Posbakum.....	7
- Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu.....	8
- Perkara Prodeo.....	8
BAB III Sumber Daya Manusia.....	9
Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan/gol/pendidikan.....	10-11
- Mutasi.....	11
- Promosi.....	12
- Pensiun.....	13
- Diklat.....	13
BAB IV Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana dan Teknologi Informasi..	14
A. Pengelolaan Keuangan.....	14
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	15-19
C. Pengelolaan Teknologi Informasi.....	19
- Implementasi e-court.....	19
- Implementasi SIPP.....	20
- Implementasi e-Berpadu.....	21-22

BAB V	Peningkatan Pelayanan Publik.....	23
	- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).....	23-25
	- Inovasi Pelayanan Publik.....	26-27
BAB VI	Pengawasan.....	28
	A. Internal.....	28
	B. Evaluasi.....	29
BAB VII	Penutup.....	30
	A. Kesimpulan.....	30
	B. Rekomendasi.....	30-31

BAB I PENDAHULUAN

Pengadilan Negeri Pandeglang merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman dilingkungan peradilan umum, sesuai Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok :

1. Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, baik perkara-perkara pidana dan perdata di tingkat pertama
2. Menyenggarakan administrasi perkara dan administrasi umum lainnya
3. Melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diberikan berdasarkan undang-undang

Dalam rangka melaksanakan Undang – undang yang diamanatkan tersebut maka Pengadilan Negeri Pandeglang menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan untuk tahun anggaran 2024 yang berisi, antara lain :

1. Laporan administrasi umum yaitu : Bidang Umum dan Keuangan, Bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana, Bidang Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
2. Laporan Administrasi Perkara (Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Pidana, dan Kepaniteraan Hukum).

Posisi Pengadilan Negeri dalam struktur satu atap dengan Mahkamah Agung menjadi tantangan ke depan yang harus dipikirkan dalam hal :

1. Menjunjung tinggi supremasi hukum demi tegaknya hukum, keadilan dan kepastian hukum.
2. Memberikan pelayanan hukum secara prima kepada masyarakat pencari keadilan.
3. Akuntabilitas dan transparansi dalam proses peradilan.
4. Penegakan hukum secara merata dalam sistem peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan

Pengadilan Negeri Pandeglang dalam melaksanakan tugas Pengadilan mempunyai visi:

“MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG YANG AGUNG”

Dalam mencapai visi yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Pandeglang mempunyai misi, yaitu :

“Menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan hukum, meningkatkan kualitas pimpinan badan peradilan dan mewujudkan kredibilitas dan transparansi lembaga peradilan”. Dengan menjalankan seluruh kegiatan melalui program-program yang disesuaikan dengan rencana kerja Mahkamah Agung RI, sebagaimana yang dimaksud visi dan misi Mahkamah Agung RI, dengan mempertegas visi Mahkamah Agung, yakni: “Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapatkan kepercayaan publik, professional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik”.

Dalam rangka menunjang terealisasinya visi dan misi tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Pandeglang telah menentukan rencana strategis. Sasaran strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Pandeglang adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

**BAB II
PERKARA**

A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

Keadaan Perkara Di Tahun 2024 Pada Pengadilan Negeri Pandeglang Dapat Dilihat Secara Rinci Pada Tabel Berikut :

SATKER	PERKARA	SISA THN 2023	MASUK THN 2024	PUTUS THN 2024	SISA THN 2024	PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA THN 2024	
PN PANDEGLANG	Pidana	Biasa	41	274	253	62	92.33%
		Cepat	0	4	4	0	100%
		Anak	0	5	5	0	100%
		Pra Peradilan	0	2	2	0	100%
	Perdata	Gugatan	14	28	31	11	110.71%
		Permohonan	1	37	37	1	100%
		Gugatan Sederhana	0	12	12	0	100%
		Perlawanan/ Bentahan	0	0	0	0	0
		Konsinyasi	0	18	7	11	38.88%

B. PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

1. JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS

Berikut Ini Rincian Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus Di Pengadilan Negeri Pandeglang Di Tahun 2024

SATKER	PERKARA		SISA PERKARA THN 2022	SISA PERKARA THN 2022 YANG DIPUTUS THN 2024	PERSentase PENYELESAIAN PERKARA
PN PANDEGLANG	Pidana	Biasa	41	41	100%
		Cepat	0	0	0
		Anak	0	0	0
		Pra Peradilan	0	0	0
	Perdata	Gugatan	14	14	100%
		Permohonan	1	1	100%
		Gugatan Sederhana	0	0	0
		Perlawanan/Bentahan	0	0	0

2. JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU

Berikut Ini Rincian Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu Di Pengadilan Negeri Pandeglang Pada Tahun 2024

SATKER	PERKARA	JUMLAH PERKARA PUTUS THN 2024	JUMLAH PERKARA DIPUTUS TEPAT WAKTU	JUMLAH PERKARA DIPUTUS TIDAK TEPAT WAKTU	PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA THN 2024	
PN PANDEGLANG	Pidana	Biasa	253	253	0	100%
		Cepat	4	4	0	100%
		Anak	5	5	0	100%
		Pra Peradilan	2	2	0	100%
	Perdata	Gugatan	31	17	14	54.83%
		Permohonan	37	37	0	100%
		Gugatan Sederhana	12	12	0	100%
		Perlawanan/ Bentahan	0	0	0	0

3. JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI DAN PK

Berikut Ini Rincian Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi Dan PK (Peninjauan Kembali) Di Pengadilan Negeri Pandeglang Pada Tahun 2024

SATKER	PERKARA		JUMLAH PERKARA PUTUS THN 2024	JUMLAH PERKARA PUTUS TH.2024 TIDAK MENGAJUKAN BANDING		JUMLAH PERKARA PUTUS TH.2024 TIDAK MENGAJUKAN KASASI		JUMLAH PERKARA PUTUS TH.2024 TIDAK MENGAJUKAN PK	
				JUM-LAH	PERSENTAS E	JUM - LAH	PERSENTA SE	JUM-LAH	PERSENTA SE
PN PANDEGLANG	Pidana	Biasa	253	234	99.5%	245	96.8%	253	100%
		Anak	5	3	60%	4	80%	5	100%
	Perdata	Gugatan	31	24	77.41%	26	83.87%	30	96.77%

3. JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DIMEDIASI

Berikut Ini Rincian Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi Di Pengadilan Negeri Pandeglang Pada Tahun 2024

SATKER	JUMLAH PERKARA PERDATA YANG DIMEDIASI DI TH.2024	STATUS KEBERHASILAN DALAM MEDIASI			DALAM PROSES
		BERHASIL	TIDAK BERHASIL	TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN	
PN PANDEGLANG	26	2	22	0	2

3. JUMLAH PERKARA ANAK YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI

Berikut ini rincian jumlah perkara pidana anak pada pengadilan negeri pandeglang yang berhasil didiversi pada tahun 2024

SATKER	JUMLAH PERKARA PIDANA ANAK TH.2024	JUMLAH PERKARA PIDANA ANAK YANG DIDIVERSI TH.2024	STATUS KEBERHASILAN DIVERSI			DALAM PROSES
			BERHASIL	TIDAK BERHASIL	TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN	
PN PANDEGLANG	5	0	0	0	0	0

- **POSBAKUM (POS BANTUAN HUKUM)**

Posbakum (Pos Bantuan Hukum) adalah suatu layanan yang dibentuk oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang fungsinya adalah memberikan pelayanan hukum yang berupa informasi dan juga konsultasi kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dalam tahun anggaran 2024, Pengadilan Negeri Pandeglang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Peradilan Umum Pengadilan Negeri Pandeglang (417845) mendapatkan alokasi anggaran untuk Pos Bantuan Hukum sebesar Rp. 31.200.000,-. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Pandeglang bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jatramada yang di tuangkan dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Pandeglang dengan jumlah layanan sebanyak 312 (tiga ratus dua belas) jam layanan, realisasi anggaran untuk Honor Advokat / Pengacara piket pada tahun anggaran 2024 tercapai **100%** (seratus persen).

- **SIDANG KELILING / PELAYANAN TERPADU**

Selama tahun 2024 Pengadilan Negeri Pandeglang tidak melaksanakan Sidang Keliling ataupun Pelayanan Terpadu.

- **PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA)**

Dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Peradilan Umum Pengadilan Negeri Pandeglang (417845) untuk Tahun Anggaran 2024, Pengadilan Negeri Pandeglang mendapat alokasi dana untuk pembiayaan perkara prodeo (pembebasan biaya perkara) sebesar Rp. 2.600.000 Dengan Jumlah 3 (tiga) Perkara Yang sudah Terealisasi Sebesar Rp. 320.000 Dengan Jumlah 2 (dua) Perkara.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia bidang Teknis Yudisial di Pengadilan Negeri Pandeglang berjumlah sebanyak 16 (enam belas) orang, yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan	Gol
1.	Ageng Priambodo Pamungkas, SH., MH.	Ketua / Hakim	IV.b
2.	Handy Reformen Kacaribu, SH.MH	Wakil Ketua / Hakim	IV.a
3.	Febriyana Elisabet, SH.,MH.	Hakim	III.b
4.	Iskandar Dzulqornain, SH., MH.	Hakim	III.b
5.	Anna Maria Stephani Siagian, SH., MH.	Hakim	III.b
6.	Sugandi Syarif, SH., MH.	Panitera	III.d
7.	Firdaus Aryansyah, SH.,MH.	Panmud Pidana	III.d
8.	Zamhari, SH., MH.	Panmud Perdata	III.d
9.	Nur Hidayah, SH.	Panmud Hukum	III.c
10.	M. Nanang Gunawan	Panitera Pengganti	III.c
11.	Ari Wahyudianto, SH.	Panitera Pengganti	III.c
12.	Arigayota Darhadi Naradana, SH.	Panitera Pengganti	III.a
13.	Gita Nungky Natalie, SH.	Panitera Pengganti	III.c
14.	Sagitarina Novianty, SH.	Panitera Pengganti	III.c
15.	R. Dudi Darmaji, SH.	Juru Sita	III.d
16.	Fahmi Afandi, A.Md	Juru Sita Pengganti	II.c

Sumber daya manusia bidang Non Teknis Yudisial di Pengadilan Negeri Pandeglang berjumlah sebanyak 10 (sepuluh) orang, yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan	Gol
1.	Elvis Reza Almany, ST., SH.	Sekretaris	III.d
2.	Sopian Badruzaman, SH.	Kasubbag Umum dan Keuangan	III.d
3.	Satria Ari Wibowo, A.Md.	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	III.b

4.	Sopian Badruzaman, SH.	Plt. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	III.d
5.	Nita Yunita, SH.	Pranata Keuangan APBN	III.c
6.	Iis Setiawati, SH.	Pranata Keuangan APBN	III.c
7.	Tapanuli Utara	Klerek Pengolah Data dan Informasi	III.b
8.	Andri Firmansyah, SH.	Klerek Analisis Perkara Peradilan	III.b
9.	Landova Sihombing, SH.	Klerek Analisis Perkara Peradilan	III.a
10.	Herni Aning Subandini, SH.	Klerek Analisis Perkara Peradilan	III.a
11.	Maria Meiranda Situmorang, A.Md.	Klerek Pengelola Penanganan Perkara	II.c

Komposisi sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Pandeglang berdasarkan pangkat / golongan adalah :

No	Pangkat / Golongan	Jumlah
1.	Pembina Tingkat I / IV.b	1
2.	Pembina / IV.a	1
3.	Penata Tingkat I / III.d	6
4.	Penata / III.c	7
5.	Penata Muda Tingkat I / III.b	6
6.	Penata Muda / III.a	3
7.	Pengatur Muda / II.c	2
JUMLAH		26

Komposisi sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Pandeglang berdasarkan tingkat pendidikan adalah :

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Strata II	7
2.	Strata I	15
3.	Diploma III	4
JUMLAH		26

Komposisi sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Pandeglang
Kenaikan pangkat dan Kenaikan gaji berkala tahun 2024 adalah :

No	Per Februari dan April 2024	Jumlah
1.	1 Orang (Per Februari)	1
2.	2 Orang (Per April)	2
JUMLAH		3

Komposisi sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Pandeglang
Kenaikan gaji berkala tahun 2024 adalah :

No	Tahun 2024	Jumlah
1.	7 Pegawai	7
JUMLAH		7

– **Mutasi**

Dalam tahun 2024, pada Pengadilan Negeri Pandeglang telah terjadi mutasi keluar yaitu:

1. Arigayota Darhadi Narandana Kala, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pandeglang Menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong.
2. Arlyan, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang Menjadi Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi.
3. Panji Answinartha, SH.,MH. Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang Menjadi Hakim Pengadilan Negeri Karawang.
4. Eva Khoerizqiah, SH. Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang Menjadi Hakim Pengadilan Negeri Garut.
5. Madela Natalia Sai Reeve, SH.,MH. Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang Menjadi Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta.
6. Gita Nungky Natalie, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pandeglang Menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Dalam tahun 2024, pada Pengadilan Negeri Pandeglang telah terjadi mutasi masuk yaitu:

1. Handy Reformen Kacaribu, SH.,MH. Hakim Pengadilan Negeri Karawang Menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang.
2. Zamhari, SH.,MH. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung Menjadi Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Pandeglang.
3. Firdaus Aryansyah, SH.,MH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Serang Menjadi Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Pandeglang.
4. Nur Hidayah, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Serang Menjadi Panitera Mudah Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang.
5. Febriyana Elisabet, SH.,MH. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Menjadi Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang.
6. Iskandar Dzulqornain, SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Menjadi Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang.
7. Anna Maria Stephani Siagian, SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Bontang Menjadi Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang.
8. Astri Mutiara Fitri, SH. Klerek Analis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Depok Menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pandeglang.

– **Promosi**

Promosi jabatan pada Pengadilan Negeri Pandeglang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Joni Mauluddin Saputra, SH. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Menjadi Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.
2. Sugandi Syarif, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Pandeglang Kelas II Menjadi Panitera Pengadilan Negeri Baturaja Kelas IB.
3. Saudur Derit Krisyanna, SH.,MH. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Pandeglang Kelas II Menjadi Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Bogor Kelas IB.
4. Ari Wahyudianto, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pandeglang Menjadi Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

- **Pensiun**

Pegawai Pengadilan Negeri Pandeglang yang pensiun pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. M. Nanang Gunawan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pandeglang Pensiun Per 1 Maret 2024

- **Diklat**

Hakim / Pegawai Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Ageng Priambodo Pamungkas, SH.,MH. Mengikuti Sertifikasi Diklat Hakim Lingkungan Hidup Bagi Hakim Peradilan Umum Tanggal 25 November – 15 Desember 2024 Secara Online atau Zoom Meeting di Pengadilan Negeri Pandeglang; dan Klasikal di Hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta.
2. Elvis Reza Almany, S.T., SH. Mengikuti Pelatihan Manajemen Kepemimpinan Pengadilan Bagi Sekretaris Pengadilan Tanggal 26 Agustus 2024 s/d 29 November 2024 Secara Online di Pengadilan Negeri Pandeglang dan Klasikal di Diklat Mahkamah Agung RI.
3. Satria Ari Wibowo, A.Md. Mengikuti Diklat Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Batch II Bagi Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tanggal 22 April 2024 s/d 24 April 2024 Secara Online di Pengadilan Negeri Pandeglang.

BAB IV

**PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN
TEKNOLOGI INFORMASI**

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIPA 01 DAN 03
PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG TAHUN 2024

No.	JENIS KEGIATAN	PAGU AWAL 2024	PAGU SETELAH REVISI	REALISASI	PERSENTASE
1.	Layanan Dukungan Manajemen Peradilan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2.	Gaji dan Tunjangan	4.724.443.000	2.924.443.000	2.705.906.630	92.53%
3.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.452.525.000	1.432.525.000	1.413.883.802	98.70%
4.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
5.	Pos Bantuan Hukum	31.200.000	31.200.000	31.200.000	100%
6.	Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama	102.000.000	117.000.000	116.576.300	99.64%
	Total	6.294.885.000	5.805.328.000	5.452.345.835	97.98%

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Adapun ruangan yang tersedia di gedung kantor Pengadilan Negeri Pandeglang termuat dalam daftar sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Ruang Ketua	1
2	Ruang Wakil Ketua	1
3	Ruang Sekretaris	1
4	Ruang Panitera	1
5	Ruang Hakim	2
6	Ruang Subbag Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana	1
7	Ruang Subbag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	1
8	Ruang Server	1
9	Ruang Perpustakaan	1
10	Ruang Arsip Hukum	3
11	Ruang Panitera Pengganti	1
12	Ruang Ramah Anak	1
13	Pantry	1
14	Ruang Subbag Umum dan Keuangan	1
15	Ruang Kepaniteraan Hukum	1
16	Ruang Kepaniteraan Pidana	1
17	Ruang Kepaniteraan Perdata	1
18	Ruang Mediasi dan Diversi	1
19	Ruang Tahanan	3
20	Ruang Sidang	4
21	Ruang Saksi Anak	1
22	Ruang Laktasi	1
23	Ruang Barang Bukti	1
24	Ruang Kesehatan	1
25	Ruang Pos Bantuan Hukum	1
26	Ruang Tunggu Jaksa	1
27	Lobby	1
28	Ruang Tunggu Pengunjung	1
29	Musholla	1
30	Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1
31	Pojok E-Court	1

32	Ruang Tamu Terbuka	1
33	Gudang	2
34	Pos Satpam	1

Rumah dinas pada Pengadilan Negeri Pandeglang termuat dalam daftar sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	KONDISI			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Rumah Dinas Ketua	1	√			
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	1			√	
3	Rumah Dinas Panitera	1			√	
4	Rumah Dinas Hakim	9			√	

Fasilitas Perkantoran Pengadilan Negeri Pandeglang termuat dalam daftar sebagai berikut :

No	Sarana/Prasarana Alat Pengolah Data Dan Komunikasi	Jumlah	Keterangan
1	Access Point	2 Unit	
2	CCTV	12 Unit	
3	Facsimile	1 Unit	
4	Infocus	2 Unit	
5	Laptop/Notebook	22 Unit	
6	P.C Unit	50 Unit	
7	PABX	1 Unit	Rusak Berat
8	Pesawat Telepon	1 Unit	
9	Printer	32 Unit	
10	Router	1 Unit	
11	Scanner	4 Unit	
12	Server	2 Unit	
13	Switch	12 Unit	
14	UPS	7 Unit	
15	Wireless Access Point	8 Unit	
16	Mesin Ketik	2 Unit	Rusak Berat

No	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran	Jumlah	Keterangan
1	A.C. Split	33 Unit	
2	A.C. Window	-	
3	A.C. Central	-	
4	A.C. Portable	2 Unit	
5	Amplifier	2 Unit	
6	Alat Detektor Barang Terlarang/X-Ray	1 Unit	
7	Alat Pengaman/Sinyal	-	
8	Alat rumah tangga lainnya	-	
9	Alat rumah tangga lainnya (home use)	1 Unit	
10	Bangku Panjang Besi/Metal	17 Unit	
11	Bangku Panjang Kayu	16 Unit	
12	Bingkai foto	8 Unit	
13	Brandkas	2 Unit	
14	Buffet	-	
15	Camera Digital	1 Unit	Rusak Berat
16	Digital Keyboard Technics/ Organ	-	
17	Dispenser	1 Unit	
18	Exhause Fan	2 Unit	
19	Filing Cabinet Besi	19 Unit	
20	Gambar Presiden/Wakil Presiden	8 Unit	
21	Genset	1 Unit	
22	Gordyn/Kray	1 Unit	
23	Jam Elektronik	5 Unit	
24	Jet Pump	1 Unit	
25	Kaca Hias	2 Unit	
26	Kasur / Spring bed	-	
27	Kipas Angin	2 Unit	
28	Kompore gas (alat dapur)	-	
29	Kursi Besi/Metal	133 Unit	
30	Kursi Kayu	34 Unit	
31	Lambang Garuda Pancasila	3 Unit	
32	Lambang Instansi	1 Unit	
33	Layar Film/Proyektor	-	
34	Lemari Besi/Metal	52 Unit	
35	Lemari Es	-	

36	Lemari Kayu	19 Unit	
37	Lensa Kamera	1 Unit	Rusak Berat
38	Loudspeaker	-	
39	Meja Kerja Besi/Metal	-	
40	Meja Kerja Kayu	103 Unit	
41	Meja Komputer	7 Unit	
42	Meja makan kayu	1 Unit	
43	Meja Rapat	17 Unit	
44	Meja Resepsionis	-	
45	Mesin Absensi	2 Unit	
46	Mesin cuci	-	
47	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1 Unit	
48	Meubelair lainnya	-	
49	Microphone/wireless MIC	-	
50	Mimbar/Podium	1 Unit	Rusak Berat
51	Overhead Projector	-	
52	Palu Sidang	4 Unit	
53	Papan Visual/Papan Nama	9 Unit	
54	Penyemprot tangan (hand sprayer)	-	
55	Rak Besi	19 Unit	
56	Rak Kayu	11 Unit	
57	Rak piring alumunium	-	
58	Rambu-rambu	1 Unit	
59	Sice	12 Unit	
60	Sirine	-	
61	Sound System	5 Unit	
62	Tabung gas	-	
63	Tangki Air	3 Unit	
64	Tape Recorder	1 Unit	
65	Televisi	2 Unit	
66	Tempat tidur kayu	-	
67	Tripod Kamera	1 Unit	
68	Troli	1 Unit	
69	White Board	13 Unit	

Kendaraan dinas pada Pengadilan Negeri Pandeglang termuat dalam daftar sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
Kendaraan Roda Empat						
1	Toyota Kijang LSX	2003	√			
2	Toyota Kijang Innova	2008	√			
3	Toyota Fortuner	2019	√			Pinjam pakai dari Pemda Pandeglang
Kendaraan Roda Dua						
1	Suzuki Shogun 125 cc	2005			√	Sudah dihapuskan
2	Suzuki Shogun 125 cc	2005			√	Sudah dihapuskan
3	Supra X 125 cc	2008	√			
4	Honda Mega Pro	2007			√	Sudah dihapuskan
5	Honda Mega Pro	2008			√	Sudah dihapuskan
6	Honda Mega Pro	2008			√	Sudah dihapuskan
7	Honda Mega Pro	2008			√	Sudah dihapuskan
8	Honda Mega Pro	2009			√	Sudah dihapuskan

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

– Implementasi E-Court di Lingkungan Peradilan Umum

Lahirnya aplikasi e-Court tidak terlepas dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Aplikasi e-Court merupakan perwujudan dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 merupakan inovasi sekaligus komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia yang mensinergikan peran teknologi informasi dengan hukum acara. Kemudahan yang diberikan dalam sistem teknologi canggih sistem pelayanan e-Court menjadi sebuah kebutuhan dalam proses menyelesaikan perkara di pengadilan dengan mobilitas tinggi para pihak berperkara.

e-Court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban) dan pemanggilan secara online. Ruang lingkup aplikasi e-Court adalah Pendaftaran Perkara Online (e-Filing), Pembayaran Panjar Biaya Online (e-SKUM), Pemanggilan Elektronik (e-Summons) dan Persidangan Online (e-Litigation).

Pengadilan Negeri Pandeglang telah menerapkan e-Court, hal ini dibuktikan dengan jumlah perkara yang masuk pada tahun 2024 sebanyak 28 perkara gugatan, 12 perkara gugatan sederhana dan 37 perkara permohonan telah menggunakan e-Court. Di samping itu, untuk mendukung penerapan e-Court pada Pengadilan Negeri Pandeglang, disediakan pula Pojok E-Court yang dapat difungsikan para pencari keadilan untuk keperluan e-Court.

Selain terdapat pojok e-Court, penerapan e-Court di Pengadilan Negeri Pandeglang juga didukung oleh petugas yang bersiap untuk membantu jika mengalami kendala dalam mengoperasikan e-Court, serta menjawab informasi e-Court secara keseluruhan.

– **Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Umum**

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi berbasis web yang diperuntukan dalam administrasi dan penelusuran terhadap data perkara pengadilan tingkat pertama. Layanan informasi berbasis teknologi ini di dalamnya terdapat pencatatan informasi yang sangat lengkap diantaranya Tahapan Perkara, Status Perkara, Biaya Perkara, Jadwal Sidang, Statistik dan Riwayat Perkara.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan, tertib administrasi, efektif dan efisien, monitoring dan pengawasan dan yang terpenting adalah media yang memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk memperbaharui informasi perkara dengan mudah dan cepat.

Untuk memantau penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Pengadilan Negeri Pandeglang telah menerapkan aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk memastikan tingkat kepatuhan pengisian data Sistem Informasi Penelusuran Perkara

(SIPP) yang terdiri dari validitas, akurasi dan ketepatan waktu pengisian data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), secara umum penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Pandeglang telah berjalan dengan baik, hal ini berdasarkan nilai rasio penanganan perkara Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada tanggal 31 Desember 2024 Pengadilan Negeri Pandeglang berada pada urutan 344 dengan rincian Nilai Kinerja sebesar 137.83 point, Nilai Kepatuhan sebesar 535.52 point, Nilai Kelengkapan sebesar 93.97 point, Nilai Kesesuaian sebesar 182.30 point dan nilai akhir Evaluasi Implementasi SIPP pada tanggal 31 Desember 2024 bernilai 949.62 point.

– **Implementasi E-Berpadu di Lingkungan Peradilan Umum**

Lahirnya aplikasi e-Berpadu tidak terlepas dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 239 Tahun 2022. Aplikasi e-Berpadu merupakan perwujudan dari implementasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 239 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 239 Tahun 2022 merupakan inovasi sekaligus komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia yang mensinergikan peran teknologi informasi dengan hukum acara. Kemudahan yang diberikan dalam sistem teknologi canggih sistem pelayanan e-Berpadu menjadi sebuah kebutuhan dalam proses menyelesaikan perkara di pengadilan dengan mobilitas tinggi para pihak berperkara.

e-Berpadu adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap Kepolisian, Kejaksaan, Rutan(Rumah Tahanan) dan Masyarakat dalam hal pelimpahan berkas perkara pidana secara online, permohonan izin sita secara online, permohonan izin geledah secara online, permohonan perpanjangan penahanan secara online, izin besuk secara online, izin pinjam pakai barang bukti secara online, pembantaran secara online dan diversifikasi secara online.

Pengadilan Negeri Pandeglang telah menerapkan e-Berpadu, hal ini dibuktikan dengan jumlah penetapan perpanjangan penahanan 335 penetapan yang berhasil, penetapan permohonan izin sita 460 penetapan yang berhasil, penetapan permohonan izin geledah 150 penetapan yang berhasil, penetapan permohonan

pembantaran 2 penetapan yang berhasil dan penetapan izin pinjam pakai 12 penetapan yang berhasil selama tahun 2024 (Data Tersebut Per 31 Desember 2024) Penerapan e-Berpadu di Pengadilan Negeri Pandeglang juga didukung oleh petugas yang bersiap untuk membantu jika mengalami kendala dalam mengoperasikan e-Berpadu, serta menjawab informasi e-Berpadu secara keseluruhan.

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

– Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan.

Perubahan sistem pelayanan tersebut adalah pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan Pengadilan Negeri melalui satu pintu.

Untuk mewujudkan pelayanan tersebut, Pengadilan Negeri Pandeglang telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang sesuai dengan tugas fungsi pengadilan.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Negeri Pandeglang dilaksanakan dengan prinsip Keterpaduan, Efektif, Efisien, Ekonomis, Koordinasi, Akuntabilitas dan Aksesibilitas.

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Negeri Pandeglang terdiri dari empat petugas yang terdiri dari :

1. Petugas Kepaniteraan Muda Pidana, yang memiliki tugas melayani :
 - Menerima pelimpahan berkas perkara pidana biasa, cepat /lalu lintas dari Penuntut Umum / Penyidik
 - Menerima pendaftaran permohonan praperadilan
 - Menerima permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi
 - Menerima permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali
 - Menerima permohonan izin/persetujuan penggeledahan dan menyerahkan izin/persetujuan penggeledahan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan

- Menerima permohonan izin/persetujuan penyitaan dan menyerahkan izin/persetujuan penyitaan yang sudah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan
- Menerima permohonan perpanjangan penahanan dan menyerahkan penetapan perpanjangan penahanan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan
- Menerima permohonan pembantaran dan menyerahkan persetujuan pembantaran yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan
- Menerima permohonan dan menyerahkan izin berobat bagi Terdakwa yang telah ditandatangani Ketua Pengadilan
- Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana

2. Petugas Kepaniteraan Muda Perdata, yang memiliki tugas melayani :

- Menerima Pendaftaran perkara gugatan biasa
- Menerima Pendaftaran perkara gugatan sederhana
- Menerima pendaftaran perkara perlawanan/bantahan
- Menerima Pendaftaran verzet atas putusan verstek
- Menerima Pendaftaran perkara permohonan
- Menerima Pendaftaran permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali
- Menerima memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali
- Menerima permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara
- Menerima Permohonan dan pengambilan turunan putusan
- Menerima Pendaftaran permohonan eksekusi
- Menerima Pendaftaran permohonan konsinyasi
- Menerima Permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi
- Menerima Permohonan pencabutan gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi

- Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara perdata

3. Petugas Kepaniteraan Muda Hukum, yang memiliki tugas melayani :

- Permohonan pendaftaran pendirian CV
- Permohonan waarmarking surat-surat
- Surat permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata
- Permohonan surat izin yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan untuk melaksanakan penelitian dan riset
- Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap
- Permohonan pendaftaran surat kuasa
- Permohonan legalisasi surat
- Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144 Tahun 2022
- Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon
- Informasi jadwal persidangan setiap hari kepada para pihak yang berkepentingan
- Penanganan pengaduan/SIWAS-MARI
- Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum

Pada Tahun 2024 Pengadilan Negeri Pandeglang sudah menggunakan Aplikasi eraterang, hal ini dibuktikan dari total 897 pembuatan surat keterangan sudah menggunakan Aplikasi eraterang.

4. Petugas Sub Bagian Umum dan Keuangan, yang memiliki tugas menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Pandeglang.

- **Inovasi Pelayanan Publik**

Dimulai Pada Tanggal 03 Januari 2024 Pengadilan Negeri Pandeglang Mengembangkan Beberapa Aplikasi Inovasi Untuk Pelayanan Publik Pengadilan Negeri Pandeglang Diantaranya Adalah :

1. Aplikasi Nomor Layanan SIKAT (Komunikasi Dan Informasi Masyarakat)
2. Aplikasi Qr Code E-Brosur Kepaniteraan

a. Nomor Layanan SIKAT (Komunikasi Dan Informasi Masyarakat)



The infographic features a yellow background with a green border. At the top left is the 'bangga melayani bangsa' logo. In the center is the 'PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG' logo. At the top right is the 'BerAKHLAK' logo with the tagline 'Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif'. The main text is in a yellow box with a green border, and a blue speech bubble on the right contains the service number. At the bottom are social media icons for Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, and a globe icon for the website.

bangga melayani bangsa

PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

Nomor Layanan SIKAT
(Komunikasi dan Informasi Masyarakat)
0852 1620 4443
Kami Siap Membantu Memberikan Layanan Yang Prima

Halo Sobat Pengadilan,
Pengadilan Negeri Pandeglang saat ini telah memiliki layanan terbaru, yaitu Layanan SIKAT. Apa itu Layanan SIKAT?
Layanan SIKAT adalah Nomor Layanan Komunikasi dan Informasi Masyarakat. Nomor layanan SIKAT dapat dipergunakan untuk melakukan aktivitas percakapan (chatting), panggilan telepon maupun panggilan video (video call) guna keperluan penyampaian informasi Pengadilan kepada Masyarakat, termasuk penyampaian informasi Perkara dari Panitera Pengganti kepada pihak berperkara atas perintah Hakim/Majelis Hakim. Layanan SIKAT hadir sebagai wujud komitmen Pengadilan Negeri Pandeglang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, mudah, transparan, terukur, terjangkau dan untuk mencegah segala bentuk penyalahgunaan yang melanggar kode etik dan hukum serta terjadinya miskomunikasi maupun misinformasi.
Ayo hubungi kami dalam Nomor Layanan 0852 1620 4443 kami siap membantu memberikan layanan yang prima.

f **▶** Pengadilan Negeri Pandeglang **pn** **pn** **0852-1620-4443** **pn-pandeglang.go.id**

b. Aplikasi Qr Code E-Brosur Kepaniteraan

Aplikasi QR Code E-Brosur Yaitu Bertujuan Untuk Mempermudah Para Pencari Keadilan Mencari Informasi Tentang Proses Administrasi Kepaniteraan Pidana, Prosedur & Persyaratan Pengajuan Permohonan Perdata, Panjar Biaya Perkara Perdata, Biaya Perkara Perdata Upaya Hukum Dan Proses Administrasi Kepaniteraan Hukum. Untuk Lebih Lanjut Silahkan Scan QR Code E-Brosur Yang Tercantum Di Bawah.



BAB VI PENGAWASAN

A. Internal

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 bahwa Pengawasan dan Pembinaan atasan langsung adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap pejabat pemangku jabatan struktural untuk membina dan mengendalikan secara terus menerus bawahan yang berada langsung dibawahnya untuk dapat melaksanakan tugas secara efektif dan efisien serta berperilaku sesuai dengan kode etik aparat peradilan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pengadilan Negeri Pandeglang melaksanakan pengawasan melekat dan fungsional yang telah dilakukan oleh Ketua dan Wakil Ketua serta Panitera dan Sekretaris. Untuk hakim-hakim pelaksanaan pengawasan melekat pada Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang, sedangkan pada pejabat Kepaniteraan, pejabat struktural maupun tenaga fungsional lainnya dilakukan oleh Panitera dan Sekretaris. Untuk staf dilakukan oleh masing-masing pejabat kepaniteraan maupun pejabat strukturalnya, sedangkan untuk Pengawas bidang telah ditunjuk Hakim Pengawas Bidang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Negeri Pandeglang. Hakim Pengawas Bidang ini telah melaksanakan tugasnya dengan membuat laporan pengawasan secara berkala yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan melalui Wakil Ketua Pengadilan.

Dalam melaksanakan pengawasan internal, Pengadilan Negeri Pandeglang telah melaksanakan pengawasan internal antara lain :

1. Melaksanakan rapat bulanan secara rutin yang membahas antara lain :
 - Evaluasi kinerja dan penyampaian hasil temuan dari masing-masing hakim pengawas bidang disertai rekomendasi dan tindak lanjut
 - Mengumumkan bila ada peraturan, kebijakan baru serta informasi penting baik yang berasal dari Pimpinan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi ataupun yang berasal dari instansi lain yang perlu disampaikan kepada seluruh hakim dan pegawai

- Laporan minutasasi perkara termasuk pengecekan pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
- 2. Secara berkala dilakukan rapat khusus Hakim, Pejabat Struktural, Panitera Pengganti serta rapat khusus Jusrita / Jusrita Pengganti untuk membahas permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing bagian dalam pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsinya serta mencari solusi pemecahannya
- 3. Secara berkala melakukan pemeriksaan / peninjauan langsung tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing
- 4. Pengawasan kedisiplinan dilakukan pengecekan rutin terhadap absensi Hakim dan Pegawai
- 5. Secara berkala dilakukan pemeriksaan uang kas bendahara pengeluaran, serta pembukuan dan penatalaksanaan arsipnya

B. Evaluasi

Pada umumnya pengawasan di Pengadilan Negeri Pandeglang telah berjalan dengan baik, karena Pengawasan melekat telah berjalan dan dilaksanakan oleh pimpinan dan pejabat yang bertanggung jawab. Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang juga telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik, karena Pengawas Bidang telah menjalankan tugasnya untuk memberikan pengawasan dan arahan-arahan, selanjutnya membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Wakil Ketua Pengadilan setiap bulan. Selain pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas bidang, pimpinan juga melakukan evaluasi melalui forum rapat bulanan yang membahas kinerja melalui aplikasi-aplikasi pendukung baik di bagian Kepaniteraan maupun di bagian Kesekretariatan.

Hasil evaluasi dan pengawasan internal pada masing-masing bagian, masih ditemukan permasalahan dan hambatan-hambatan sebagai berikut :

1. Masih banyaknya Panitera Pengganti yang diperbantukan di Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata dan Kepaniteraan Hukum, hal ini disebabkan karena kurangnya pegawai pada Pengadilan Negeri Pandeglang
2. Masih banyak rumah dinas yang rusak berat dan harus segera diperbaiki
3. DIPA yang akan datang agar lebih ditingkatkan lagi, sehingga dana operasional kegiatan kantor bisa tercukupi.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengadilan Negeri Pandeglang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terus meningkatkan pelayanan publik dengan tetap berpegang teguh pada prinsip transparansi dan akuntabilitas
2. Pengadilan Negeri Pandeglang telah berupaya secara maksimal untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum sudah berjalan dengan baik dan semestinya
4. Pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Negeri Pandeglang telah dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
5. Dalam meningkatkan pelayanan publik, Pengadilan Negeri Pandeglang telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, E-Court Era Terang dan E-Berpadu
6. Peningkatan mutu menuju profesionalisme bagi karyawan dan karyawan Pengadlan Negeri Pandeglang telah dilaksanakan, dengan cara mengikuti pendidikan formal ke tingkat yang lebih tinggi dan juga dengan cara mengikut sertakan pendidikan dan latihan serta penataran-penataran yang diadakan oleh pusdiklat Mahkamah Agung RI maupun yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Banten dan Departemen Keuangan

B. Rekomendasi

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan kinerja, maka diperlukan :

1. Adanya pembinaan sumber daya manusia dalam berbagai bentuk kegiatan bimbingan atau pendidikan atau pelatihan agar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat berjalan dengan baik dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik
2. Penambahan alokasi anggaran guna memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana
3. Supaya mengusulkan anggaran perbaikan / renovasi rumah dinas hakim pada tahun anggaran yang akan datang karena sudah banyak yang hancur / rusak berat